

**DETERMINAN KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH  
STUDI KASUS : PROVINSI SUMATERA BARAT,  
PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2004 DAN TAHUN 2014**

**Tesis**

**NOPA LINDA**

**1620511011**

**Pembimbing : 1. Indrawari, SE, MA, Ph.D**

**2. Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2019**

**DETERMINAN KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH  
STUDI KASUS : PROVINSI SUMATERA BARAT,  
PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2004 DAN TAHUN 2014**

**Oleh: Nopa Linda**

Dibawah bimbingan Indrawari SE, MA, Ph.D,  
dan Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA

**Abstrak**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Salah satu masalah fundamental yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah ketimpangan penguasaan tanah. Hal ini diduga dapat menyebabkan rendahnya pendapatan petani. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketimpangan penguasaan tanah, ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau tahun 2004 dan tahun 2014 serta menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau tahun 2004 dan tahun 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data cross section berupa data primer dari hasil olah raw data survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) tahun 2004 dan SPP tahun 2014 pada Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau serta data lain yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Sementara itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah pada ketiga provinsi pada tahun 2004 didominasi oleh tingkat ketimpangan yang rendah namun pada tahun 2014 kondisi ini mengalami perubahan yaitu dominannya tingkat ketimpangan sedang. Sedangkan kondisi ketimpangan pendapatan untuk ketiga provinsi pada tahun 2004 dan 2014 didominasi oleh tingkat ketimpangan yang rendah. Selanjutnya jumlah yang berusaha di sektor pertanian mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2014 sedangkan jumlah yang menjadi buruh nonpertanian mengalami peningkatan selama periode tersebut. Sementara itu terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah pada Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Sedangkan pada Provinsi Riau pengaruh ini tidak dapat dijelaskan karena data yang didapatkan tidak memenuhi uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

Kata kunci: Ketimpangan Penguasaan Tanah, Ketimpangan Pendapatan, Rumah Tangga Pertanian

**DETERMINANTS OF INEQUALITY OF LAND TENURE  
CASE STUDY : PROVINCES SUMATERA BARAT,  
JAMBI DAN RIAU IN 2004 AND 2014**

**By Nopa Linda**

*Supervised by: Indrawari SE, MA, Ph.D,  
and Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA*

***Abstract***

*Agriculture has been contributing the largest share in the regional output of provinces Sumatera Barat, jambi and riau (SJR). However, the agriculture sector itself is still exposed to a fundamental problem namely inequality of land tenure which is presumed as a factor that lowers local farmer earning. This study is aimed to reveal the fact about inequality of land tenure, earning inequality among farmers, amount of agricultural and non agricultural employment in SJR in 2004 and 2014. We also analyze the effect of earning inequality among farmers, the amount of agricultural and non agricultural employment on the inequality of land tenure in SJR in 2004 and 2014.*

*The data are sourced from the Earning of Agricultural Households Survey which were conducted by Central Bureau of Statitics (BPS) in 2004 and 2014 along with some supporting data released BPS for the three provinces. We use both quantitative and qualitative methods to complete our analysis.*

*The result shows the low level of inequality of land tenure in SJR in 2004. In 2014, such inequality raised to become medium. The earning inequalities in SJR are found to be low in both terms. The amount of agricultural employment is found declined, yet the amount of non agricultural employment raised in the same terms in SJR. From the regression result, it is revealed that the earning inequality, the amount of agricultural and non agricultural employment significantly affect the inequality of land tenure in Sumatera Barat and Jambi. Meanwhile in Riau, the effect is unexplainable for heteroscedasticity and normality problems*

*Keywords: Inequality of land tenure, earning inequality, agricultural household*